

BAB II

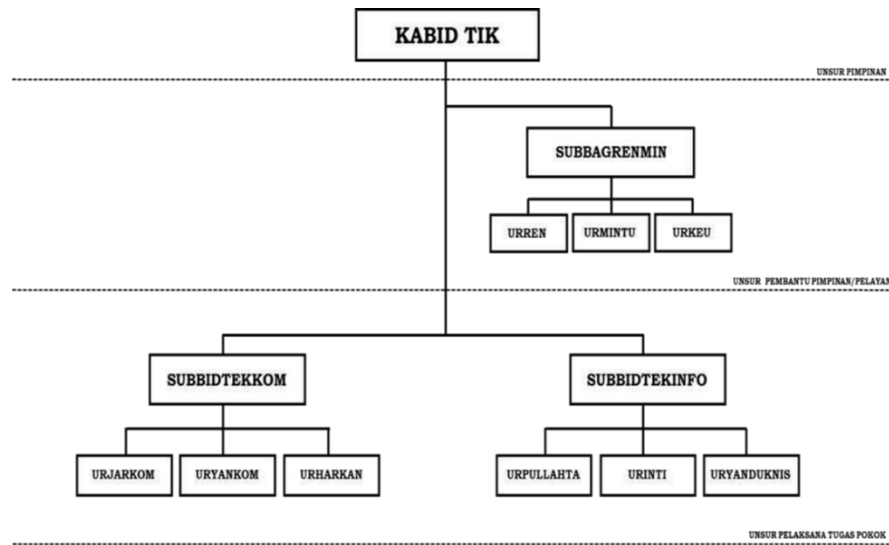
TINJAUAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Polda

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan atau Polda Kalsel (dulu bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) XIII/Kalimantan Selatan) adalah pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Maka, lingkup gerak tugas dan wewenang Kepolisian Daerah sejatinya hanya mencakup di wilayah provinsi. Polda bertugas : melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[1].

Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang keberadaannya sebagaimana dituangkan dalam pasal 30 ayat 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

2.2 Struktur Organisasi dan Job Deskripsi



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bidang TIK

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.

Adapun fungsi dari setiap sub bidang organisasi Bid TIK adalah :

1. Kepala Bid TIK
 - a. Sebagai pimpinan dari bidang TIK.
 - b. Mengawasi semua kegiatan anggota polri di bidang TIK.
2. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - a. Urusan Perencanaan (Urren).
 - b. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu).
 - c. Urusan Keuangan (Urkeu).
3. Subbidang Teknologi Komunikasi (Subbidtekkom), terdiri atas:

- a. Urusan Jaringan Komunikasi (Urjarkom).
 - b. Urusan Pelayanan Komunikasi (Uryankom).
 - c. Urusan Pemeliharaan dan Perbaikan (Urharkan).
4. Subbidang Teknologi Informasi (Subbidtekinfo), terdiri atas:
- a. Urusan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data (Urpullahta).
 - b. Urusan Infrastruktur Teknologi Informasi (Urinti).
 - c. Urusan Layanan dan Dukungan Teknis (Uryanduknis).

2.3 Sejarah Berdirinya Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

Dalam situasi politik yang tidak stabil pada tahun 1950-an, berpengaruh besar terhadap organisasi militer yang kemudian melahirkan kekacauan kekacauan nasional. Beberapa kelompok separatis bersenjata muncul di mana-mana. Saat itulah satuan-satuan Mobrig yang setia kepada Republik ini secara aktif turut melakukan penumpasan dan pengamanan diberbagai daerah di tanah air. Dari rangkaian sejarah ini, terbentuk Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.

Pengabdian Mobrig dalam melaksanakan tugas Negara tidak pernah surut. Sekitar tahun 1953, di Kalimantan Selatan, satuan Mobrig yang berasal kesatuan Surabaya dikerahkan untuk memadamkan pemberontakan rakyat pimpinan Letnan Dua Ibnu Hajar, Komandan Pasukan Pengempur Divisi IV ALRI di Kalimantan Selatan. Satuan Mobrig yang berasal dari kesatuan Surabaya itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya Polda Kalimantan Selatan

Kekecewaan yang berulang-ulang telah membuat Ibnu Hajar pada bulan Oktober 1950 di Kalimantan Selatan membentuk Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRyT) dan menyatakan gerakannya sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) dengan wilayah pergerakannya di daerah Hulu Sungai sepanjang kawasan pegunungan Maratus pada wilayah Kalimantan Selatan. Selain kelompok Ibnu Hajar, ada juga kelompok yang dikenal dengan nama Gerakan Mandau Talawang Panca Sila (GMTPS), pimpinan Christian Simbar di daerah sepanjang perairan Sungai Barito di wilayah Kalimantan Tengah. Gerakan Ibnu Hajar dengan KRyTnya dalam aksinya menggunakan taktik perang gerilya. Aktivitas aksinya semakin meluas ke wilayah-wilayah Barabai, Birayang, Batumandi, Paringin, Kelua dan Kandangan.

Selain melalui kekuatan bersenjata dalam menghadapi pemberontakan Ibnu Hajar, pemerintah pusat juga menggunakan pendekatan melalui tokoh-tokoh kharismatik lokal seperti Hasan Basery (mantan komandannya Ibnu Hajar) dan Idham Khalid seorang politikus dari Nahdlatul Ulama (NU) untuk membujuk Ibnu Hajar dan KRyTnya agar meletakkan senjata dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Awalnya Ibnu Hajar bersedia untuk menyerahkan diri namun setelah menyerahkan diri, Ibnu Hajar akhirnya melarikan diri dan melakukan pemberontakan kembali. Selanjutnya pemerintah melakukan tindakan yang tegas sehingga pada akhir tahun 1959 Ibnu Hajar beserta seluruh anggota gerombolannya tertangkap. Ibnu Hajar sendiri akhirnya dihukum mati pada juii tahun 1963.

Selama mengatasi pemberontakan Ibnu Hajar dan Simbar, berbagai peristiwa heroik terjadi. Salah satunya adalah peristiwa tragis dan mengharukan bagi Bhayangkari Polda Kalsel. Pada tanggal 28 September 1953 Mathilda Batlayeri, seorang Bhayangkari gugur bersama-sama ketiga anak dan janin dalam kandungannya pada saat membantu mempertahankan Pos/Asrama Polisi yang diserang oleh gerombolan KRyT.

Secara formal, bersamaan datangnya pasukan Mobrig, Kepolisian Kalimantan pada 1953 terbentuk dan berkedudukan pertama di Banjarmasin. Pada awalnya Polda Kalsel dikenal dengan sebutan Kepolisian Keresidenan Kalimantan, dimana pada saat itu Keresidenan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjadi satu berkedudukan di Banjarmasin. Baru pada 23 Mei 1957, Keresidenan Kalimantan Tengah resmi berdiri sendiri menjadi Provinsi dengan Ibukota Palangkaraya. Namun Kepolisian Kalimantan masih mencakup Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Berdasarkan SK Perdana Menteri RI, tanggal 12 Januari 1959, sebutan untuk Kepolisian di Kalimantan yang semula Kepolisian Provinsi (KPPPROP) Kalimantan, berubah menjadi Kepolisian Komisariat (KPKOM). Sementara itu sebutan untuk Kepolisian Resort disingkat KPPRES, dimana pada waktu itu KPKOM Kalsel membawahi 7 KPPRES. Dan berdasarkan Keputusan Presiden RI tertanggal 12 April 1962, nama Kepolisian Negara kembali berubah menjadi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Menyusul perubahan tersebut, maka sebutan Kepala

Kepolisian Negara (yang sekarang disebut Kapolri) berubah menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia disingkat Menpangak.

Maka sejak itu juga sebutan Markas Besar AKRI disingkat MARAK. Sebutan untuk Kepolidian di tingkat Provinsi menjadi Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat KOMDAK. Di tingkat Kabupaten di sebut Komando Resort Kepolisian disingkat KOMRES, ditingkat Kecamatan disebut Komando Dsitrik atau KOMDIS. Sedangkan untuk pimpinan Kepolisian di tingkat KOMDAK adalah Panglima Komando Daerah Angkatan Kepolisian disingkat Pangdak, di tingkat KOMRES adalah Komandan Resort (Danres) dan di tingkat KOMSEK yaitu Dansek atau Dandis. Sejak itulah Komdak XIII/Kalsel terbentuk.

Pada tahun 1962 terjadi musibah kebakaran yang menimpa Markas Komdak XIII/Kalsel dan menghancurkan seluruh bangunan beserta isinya. Pada bulan Juli 1963, Ibnu Khajar dan pengikutnya meyerahkan diri di Desa Ambulun Hulu Sungai Selatan. Pada tahun yang sama juga, berdirilah lembaga pendidikan di Banjarbaru yang waktu itu bernama Sekolah Angkatan Kepolisian disingkat SAK (sekarang SPN). berdasarkan Surat Keputusan Mehankam/Pangab, pada tahun 1974 dilakukan likuidasi antara Komdak XIII/Kalsel dengan Komdak XII/Kaltengmenjadi satu komando dengan sebutan KOMDAK XIII/KALRA (Kalimantan Tenggara) dengan Brigjen Pol. Drs. R. Hardono sebagai Kadapol XIII/Kalra yang pertama.

Komdak XIII/Kalrayang berstatus tipe B itu membawahi 16 Komres dan 129 Komsek.

Sebutan Polda Kalselteng dimulai sejak reorganisasi Polri di tahun 1984. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Pangab nomor : Kep/11/X/1992 tanggal 5 Oktober 1992, terjadi likuidasi Polda Kaselteng menjadi Polda Kalsel dan Polda Kalteng yang realisasinya dilaksanakan pada penghujung tahun anggaran 1994/1995. Pemisahan ini ditandai dengan penyerahan Pataka “TUNGGAL DHARMA VISUDA” untuk Polda Kalsel dan Pataka “MANUNGGAL DHARMA CARYA JAYA” untuk Polda Kalteng. Namun dampaknya adalah status Polda Kalsel yang sebelumnya tipe “B” dipimpin oleh seorang Brigjen, sejak likuidasi tersebut turun menjadi tipe “C” dan dipimpin oleh seorang Kolonel.

Pada perkembangan berikutnya, berdasarkan keputusan Menhankam pada bulan Oktober 1999, dikukuhkan pada tanggal 19 Oktober 1999 status Polda Kalsel ditingkatkan kembali menjadi tipe “B” bersama-sama dengan Polda Kalbar, DIY, Sulut, Bali, Aceh, Riau, Jambi, NTT dan Maluku. Seiring naiknya status maka dengan sendirinya Polda Kalsel kembali dipimpin oleh seorang polisi berpangkat Brigjen Pol hingga sekarang. Perubahan status Polda Kalsel dan Polda-Polda lainnya sangat berkaitan dengan tuntutan reformasi di dalam tubuh Polri berkenaan dengan pemisahan Polri dari ABRI pada tanggal 1 April 1999 yang menginginkan kinerja Polri khususnya Polda Kalsel menjadi lebih mandiri dan proaktif.[5]

2.4 Sistem Yang Sedang Berjalan

Polda Kalimantan Selatan terutama pada bidang TIK saat ini masih melakukan pemanggilan nama satu per satu untuk melakukan absen dan belum terdapat sistem berbasis website untuk melakukan absensi. Sehingga perlu dibuatnya sistem absensi berbasis website untuk mempermudah pegawai untuk melakukan absen.

2.5 Landasan Teori

2.5.1 Perancangan

Perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai memperbaiki dan menyusun suatu sistem, baik sistem fisik maupun non fisik yang optimum untuk waktu yang akan datang dengan memanfaatkan informasi yang ada (Rusdi & Muhammad Arsyad 2012:5)[6].

2.5.2 Sistem

Sistem adalah suatu kumpulan objek atau unsur - unsur atau bagian-bagian yang memiliki arti berbeda - beda yang saling memiliki hubungan, saling berkerjasama dan saling memengaruhi satu sama lain serta memiliki keterikatan pada rencana atau plan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu pada lingkungan yang kompleks[7]

2.5.3 Absensi

Absensi adalah suatu bentuk pendataan presensi atau kehadiran seseorang atau pegawai yang merupakan bagian pelaporan dari suatu

institusi yang berisi data - data status kehadiran yang disusun dan diatur secara rapi dan mudah untuk dicari, dan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pihak yang berkepentingan (Erna Simonna, 2009)[8]

2.5.4 Sistem Absensi

Sistem absensi adalah sebuah sistem yang mencatat kehadiran karyawan berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah diatur. Paling tidak, sebuah data yang dihasilkan dari sistem absensi karyawan akan menampilkan informasi: Waktu datang/Waktu pulang. Waktu terlambat[9].

2.5.5 Website

Website adalah kumpulan informasi/kumpulan *page* yang biasa diakses lewat jalur internet. Setiap orang di berbagai tempat dan segala waktu bisa menggunakannya selama terhubung secara *online* di jaringan internet. Secara teknis, *website* adalah kumpulan dari *page*, yang tergabung kedalam suatu domain atau subdomain tertentu[10].

2.5.6 MySQL



Gambar 2. 2 MySQL

MySQL adalah sebuah *software* atau perangkat lunak sistem manajemen berbasis data SQL atau juga multi user dan DBMD

Multithread. Pada dasarnya, MySQL ini sebenarnya adalah turunan yang berasal dari salah satu konsep utama dalam database yang memang telah ada sebelumnya yaitu SQL atau *Structured Query Language*[11].

2.5.7 PHP



Gambar 2. 3 PHP

PHP merupakan singkatan dari PHP : *Hypertext Preprocessor* adalah salah satu Bahasa scripting open source yang banyak digunakan oleh Web Developer untuk pengembangan Web. PHP banyak digunakan untuk membuat banyak project seperti Grafik Antarmuka (GUI), Website Dinamis, dan lain-lain[12].

2.5.8 Visual Studio Code



Gambar 2.4 Visual Studio Code

Visual Studio Code adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform, artinya tersedia juga untuk versi Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung mendukung bahasa pemrograman JavaScript, Typescript, dan Node.js,

serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace Visual Studio Code (seperti C++, C#, Python, Go, Java, dst)[13].

2.5.9 XAMPP Control Panel



Gambar 2.5 XAMPP Control Panel

XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan komplikasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri, yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan Bahasa pemrograman PHP dan Perl[14].